

Membangun Kecakapan Literasi Digital Di Era Disinformasi: Telaah Teoritis dan Implikasinya Pada Perguruan Tinggi

Felizka Salsabila¹, Tasya Putri Daviza², Kurnia Istiqomah³, Zilzian Ibadillah⁴,
Muhammad Ikhsan⁵, Eva Iryani⁶, Helty Asafri⁷

Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Jambi, Jambi

Email: feliskasalsabila.06@gmail.com¹, tasyapd565@gmail.com²,
kurniaistiqomah782@gmail.com³, zilzianibadillah@gmail.com⁴,

Muhhammadikhssannn126@gmail.com⁵, Evairyani@unja.ac.id⁶, heltyasafri@unja.ac.id⁷

Article History:

Received: 03 Juni 2025

Revised: 25 Juli 2025

Accepted: 02 Agustus 2025

Keywords: *Literasi Digital, Era Disinformasi, Informasi Digital*

Abstract: *Literasi digital adalah kemampuan esensial di era informasi, meliputi kecakapan intelektual untuk mengakses, memahami, memanfaatkan, dan menciptakan konten digital secara efektif. Dimensi utamanya mencakup literasi informasi, komunikasi, kreasi konten, keamanan, dan pemecahan masalah. Peningkatan di bidang keamanan siber dan kreativitas masih dibutuhkan. Masyarakat kini dihadapkan pada era disinformasi yang ditandai fenomena post-truth dan penyebaran disinformasi (informasi palsu disengaja). Penting memahami perbedaan disinformasi dari misinformasi (informasi keliru tak disengaja) dan malinformasi (informasi benar berniat jahat). Menanggulangi disinformasi memerlukan regulasi, peningkatan literasi media, dan kolaborasi internasional. Penguatan literasi digital krusial untuk membentuk individu yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab di ruang digital.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dunia ke dalam era digital yang sangat dinamis. Arus informasi kini mengalir dengan sangat cepat dan luas, melintasi batas geografis dan sosial melalui berbagai platform digital seperti media sosial, portal berita daring, dan aplikasi pesan instan. Di satu sisi, kemudahan ini membuka peluang besar dalam penyebaran ilmu pengetahuan, kolaborasi global, dan pertukaran ide yang lebih inklusif. Namun, di sisi lain, era digital juga menghadirkan tantangan serius, salah satunya adalah maraknya penyebaran disinformasi.

Disinformasi, yaitu penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan, sering kali terjadi secara masif dan sistematis. Dalam konteks perguruan tinggi, fenomena ini tidak bisa dianggap sepele. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi digital, merupakan pengguna aktif teknologi dan internet. Tanpa kecakapan yang memadai dalam memahami dan menyaring informasi, mereka berisiko menjadi korban maupun penyebar disinformasi. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kualitas pemikiran kritis, ketepatan pengambilan keputusan, hingga stabilitas sosial di lingkungan kampus.

Di samping itu, algoritma media sosial yang didesain untuk memperkuat preferensi

pengguna sering kali menciptakan ruang gema (echo chamber) yang mempersempit perspektif. Akibatnya, mahasiswa lebih mudah terjebak dalam bias informasi yang memperkuat pandangan tertentu tanpa menyadari adanya keberagaman sudut pandang. Ini menjadi tantangan serius dalam menciptakan kultur akademik yang terbuka, kritis, dan berbasis pada kebenaran ilmiah.

Dalam menghadapi tantangan ini, literasi digital menjadi keterampilan yang sangat penting dan mendesak untuk dikuasai oleh seluruh sivitas akademika, terutama mahasiswa. Literasi digital mencakup tidak hanya kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga kemampuan berpikir kritis terhadap informasi, memahami sumber dan konteks informasi, serta memiliki etika digital dalam berkomunikasi dan berbagi konten. Perguruan tinggi, sebagai institusi pendidikan tinggi, memiliki tanggung jawab strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bijak secara digital.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode kajian pustaka (library research), yaitu dengan menelaah berbagai literatur, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan tema literasi digital dan disinformasi di era digital. Sumber-sumber tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memahami berbagai pendekatan teoritis mengenai literasi digital serta implikasinya di lingkungan perguruan tinggi.

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif-analitis. Penulis mendeskripsikan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan literasi digital dan disinformasi, lalu menganalisisnya dalam konteks pendidikan tinggi. Dengan pendekatan ini, artikel bertujuan memberikan pemahaman yang utuh mengenai pentingnya membangun kecakapan literasi digital dan menawarkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh institusi perguruan tinggi.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber sekunder secara daring menggunakan kata kunci seperti “digital literacy in higher education,” “disinformation and students,” serta “media literacy.” Validitas data dijaga dengan memilih referensi yang berasal dari sumber terpercaya dan telah teruji secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telaah Teoretis Literasi Digital

1.1.1 Definisi Literasi Digital dari Berbagai Perspektif

Istilah *literasi digital* pertama kali diperkenalkan oleh Paul Gilster. Menurutnya, literasi digital tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat digital seperti komputer atau smartphone. Gilster menekankan bahwa literasi digital lebih merupakan kecakapan intelektual dalam mengakses, memahami, serta memanfaatkan informasi yang tersedia melalui berbagai media digital secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup kemampuan berpikir kritis, bersikap selektif terhadap informasi yang diterima, serta kecakapan dalam mengevaluasi validitas informasi yang sering kali bersifat kompleks dan mudah berubah (Gramedia, 2023) (“Hague & Martin, 2022”).

Dalam dunia pendidikan, pandangan mengenai literasi digital semakin berkembang. Deakin University, melalui Graduate Learning Outcome-nya, menggambarkan literasi digital sebagai proses aktif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mencari, menggunakan, dan membagikan informasi dengan bijaksana. Artinya, peserta didik baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi dituntut untuk menjadi pengguna teknologi yang aktif dan

bertanggung jawab, bukan hanya sekadar pengguna pasif. Literasi digital dalam hal ini dianggap sebagai bagian penting dalam membentuk individu yang mampu belajar sepanjang hayat, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital (Gramedia, 2023)

Sementara itu, organisasi dan media seperti Common Sense Media menekankan pentingnya penguasaan aspek praktis dari literasi digital. Mereka menyoroti tiga kemampuan utama yang harus dimiliki, yakni keterampilan menggunakan teknologi digital, kemampuan untuk menilai kebenaran serta kredibilitas konten digital, dan kecakapan dalam berkomunikasi serta mencari informasi menggunakan alat digital yang tepat (Gramedia, 2023). Dalam konteks ini, pemahaman terhadap literasi digital sangat krusial agar individu tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan serta dapat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Dari sudut pandang akademik, para pakar seperti Hague dan Martin memberikan gambaran yang lebih luas mengenai literasi digital. Hague menekankan bahwa literasi digital tidak hanya melibatkan konsumsi informasi, tetapi juga kemampuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan menyampaikan informasi dalam berbagai format media (Hague dan Martin, 2022). Hal ini mencerminkan peran aktif individu dalam menghasilkan konten digital yang informatif dan bermakna. Sementara itu, Martin menambahkan bahwa literasi digital mencakup kemampuan untuk mengakses, mengorganisasi, menganalisis, serta mengevaluasi informasi digital, yang pada akhirnya bertujuan membangun pengetahuan baru, mengekspresikan diri, dan menjalin komunikasi yang efektif dalam masyarakat yang terus mengalami perubahan sosial dan budaya (Hague dan Martin, 2022).

Dalam kehidupan sehari-hari, literasi digital memainkan peran penting dalam membantu individu menjalani aktivitasnya, mulai dari mencari informasi, berkomunikasi, hingga melakukan transaksi secara daring. Keterampilan ini mencakup kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi, kesadaran terhadap risiko di dunia digital seperti privasi dan keamanan data, serta pemanfaatan teknologi dengan tanggung jawab sosial. Tidak hanya itu, literasi digital juga menjadi elemen penting dalam mendukung dunia kerja, pendidikan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Terakhir, Wikipedia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia juga turut memberikan kontribusi dalam mendefinisikan literasi digital. Wikipedia menggambarkan literasi digital sebagai gabungan antara pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan perangkat serta media digital secara bijak, sehat, dan sesuai hukum. Kominfo sendiri menyusun kerangka literasi digital ke dalam empat pilar utama, yaitu keterampilan digital (digital skill), pemahaman budaya digital (digital culture), kesadaran etika dalam ruang digital (digital ethics), serta kemampuan melindungi diri di dunia maya (digital safety). Keseluruhan kerangka ini bertujuan membentuk masyarakat yang tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga bijak dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital (CNN Indonesia, 2023) ("Literasi Digital_ Pengertian, Pilar, Dan Manfaatnya," n.d.)

1.1.2 Dimensi-dimensi Literasi Digital

A. Literasi Informasi

Literasi informasi mengacu pada kemampuan individu dalam mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara cermat dan efisien. Mahasiswa dituntut untuk dapat menyaring informasi yang akurat dan relevan dari berbagai sumber daring guna menunjang kegiatan akademik dan pengambilan keputusan (Rahayu dkk., 2023; Fitriyani dan Teguh Nugroho, 2022). Aspek ini mencakup keterampilan analisis serta pemahaman terhadap konteks digital agar terhindar dari hoaks atau informasi yang menyesatkan.

B. Literasi Komunikasi Digital

Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi digital untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara bijak, sopan, dan efektif. Mahasiswa perlu menguasai berbagai platform digital untuk saling bertukar gagasan, berdiskusi, serta menjalin kerja sama baik dalam lingkungan akademik maupun sosial (Naufal 2021). Etika dan norma digital juga menjadi bagian penting dari literasi ini.

C. Literasi dalam Pembuatan Konten Digital

Kemampuan untuk merancang dan mengelola berbagai bentuk konten digital seperti tulisan, gambar, maupun video, sangat penting dalam mengekspresikan gagasan dan berpartisipasi di ruang digital. Mahasiswa yang memiliki kemampuan ini dapat menghasilkan karya yang inovatif, berkualitas, serta memahami isu hak cipta dan lisensi digital (Nurjanah, Rusmana, and Yanto 2017)

D. Literasi Keamanan Digital

Aspek ini mencakup pemahaman terhadap pentingnya menjaga data pribadi dan memastikan keamanan saat menggunakan teknologi. Mahasiswa harus menyadari ancaman digital seperti malware, phishing, atau pencurian data, serta mampu menerapkan langkah-langkah pencegahan agar tetap aman dan bertanggung jawab saat online (Aswan, n.d.).

E. Literasi Pemecahan Masalah Digital

Dimensi ini menitikberatkan pada kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan persoalan, baik dalam konteks akademik maupun kehidupan sehari-hari. Mahasiswa harus dapat menyesuaikan penggunaan teknologi sesuai kebutuhan dan mengatasi kendala teknis secara mandiri (Aswan, 2022).

Berdasarkan sejumlah penelitian di perguruan tinggi Indonesia, diketahui bahwa tingkat literasi digital mahasiswa tergolong cukup baik. Namun, peningkatan masih dibutuhkan, terutama dalam aspek keamanan siber dan kreativitas dalam membuat konten (Aswan, n.d.). Oleh karena itu, integrasi kelima dimensi literasi digital dalam kurikulum sangat disarankan agar mahasiswa siap menghadapi tantangan di era digital secara menyeluruh.

Dengan mengembangkan kecakapan literasi digital yang menyeluruh mencakup informasi, komunikasi, kreasi konten, keamanan, serta pemecahan masalah - perguruan tinggi tidak hanya mencetak pengguna teknologi, tetapi juga membentuk generasi digital yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.

1.1.3 *Model-model Literasi Digital yang Relevan*

A. Model Literasi Digital Melalui E-Learning

Model ini bertujuan meningkatkan literasi digital dengan memanfaatkan platform pembelajaran daring. Mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam komunikasi dan kolaborasi digital, sehingga keterampilan teknologi, berpikir kritis, dan kemampuan berkomunikasi mereka dapat terasah. Pendekatan ini terbukti efektif untuk menumbuhkan kecakapan digital dalam lingkungan akademik (Setyaningsih et al., n.d.).

B. Model Literasi Digital Berbasis Tradisi dan Transformasi

Model ini muncul dari perguruan tinggi berbasis pesantren yang menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan kemajuan teknologi. Proses belajar bersifat aktif dan kolaboratif, dibarengi dengan bimbingan dari pendidik, serta memadukan sistem pembelajaran tatap muka dan daring (hybrid learning) untuk membentuk budaya digital yang adaptif (Budaya et al. 2022)

C. Model Protektif dan Partisipatif dalam Literasi Digital

Pendekatan ini mencakup dua sisi: proteksi terhadap risiko dunia maya serta pemberdayaan mahasiswa agar aktif dan kritis saat mengakses dan memproduksi konten digital. Tujuannya adalah menciptakan pengguna teknologi yang tidak hanya waspada tetapi juga produktif dan kreatif (Jordana and Suwanto 2017).

D. Model Literasi Digital untuk Pembentukan Karakter

Model ini menjadikan literasi digital sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai etis dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Prosesnya melalui tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran karakter, yang selaras dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0 dalam konteks pendidikan tinggi (Nur and Sari, n.d.)

1.2 Era Disinformasi

1.2.1 Karakteristik Era Disinformasi

Antara misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Misinformasi adalah kesalahan informasi Era post-truth atau pascakebenaran menjadi tantangan serius dalam politik kontemporer, ditandai oleh semakin menyusutnya peran fakta objektif dalam membentuk opini publik. Dalam kondisi ini, kebenaran sering kali dikesampingkan demi mendukung narasi yang emosional dan berpihak pada ideologi tertentu. Post-truth menggambarkan situasi ketika masyarakat lebih percaya pada informasi yang sesuai dengan keyakinan atau perasaan mereka, meskipun bertentangan dengan bukti empiris (Keyes, 2004). Disinformasi, yakni penyebaran informasi palsu yang disengaja, digunakan secara strategis untuk memanipulasi persepsi publik, memperkuat agenda politik, dan memperkeruh ruang demokrasi. Kehadiran teknologi digital, khususnya media sosial, mempercepat penyebaran disinformasi ini secara luas dan tak terkendali, sehingga memperbesar dampaknya terhadap stabilitas politik dan dinamika global (Glasser, 2016; Suharyanto, 2019).

Peran media sosial dalam memperparah fenomena post-truth sangatlah krusial. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram telah menjadi sarang utama bagi penyebaran informasi palsu dan disinformasi. Algoritma yang digunakan oleh platform-platform ini cenderung memprioritaskan konten yang sesuai dengan preferensi dan keyakinan pengguna, sehingga membentuk sebuah “ruang gema” (echo chambers) di mana individu hanya menerima informasi yang menguatkan pandangan mereka sendiri tanpa ada paparan terhadap sudut pandang alternatif (Garbani, 2021; Aminudin, 2022). Kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya polarisasi sosial, membuat masyarakat lebih mudah terjebak dalam manipulasi informasi yang tidak valid, dan pada akhirnya dapat menyebabkan keputusan politik yang keliru (Lumintang, 2020).

Lebih jauh, fenomena post-truth ini berdampak signifikan pada proses demokrasi. Lingkungan informasi yang dipenuhi disinformasi dan hoaks memungkinkan terganggunya jalannya pemilu yang adil dan transparan. Kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi pun mengalami penurunan drastis, mengancam legitimasi dan stabilitas sistem

politik (Rachmawati, 2023). Oleh karena itu, peran media sosial sebagai medium informasi sekaligus tantangan besar dalam menjaga kualitas demokrasi harus menjadi perhatian utama para pemangku kebijakan dan masyarakat luas.

Dalam berbagai situasi, informasi palsu yang beredar melalui media sosial sering dimanfaatkan oleh aktor politik untuk memanipulasi opini publik serta membentuk persepsi yang keliru terkait kondisi politik dan sosial. Di Indonesia, misalnya, pemilihan umum pada tahun 2019 diwarnai oleh gelombang penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang memperdalam polarisasi masyarakat, mengancam stabilitas politik nasional, serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan (Fatmawati, 2020; Faturahmi, 2020). Fenomena post-truth tidak hanya berdampak secara nasional tetapi juga memiliki konsekuensi global yang merusak fondasi demokrasi. Disinformasi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat narasi politik tertentu, yang kerap kali bersifat populis dan mengabaikan fakta-fakta objektif yang ada (Mietzner, 2015). Kondisi ini memperburuk ketegangan sosial dan menimbulkan tantangan serius bagi kelangsungan sistem politik demokratis di berbagai negara.

Mengatasi dampak disinformasi di era post-truth menuntut pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Pertama, pemerintah perlu merancang dan menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait penyebaran informasi di platform media sosial. Hal ini mencakup kewajiban bagi penyedia platform untuk transparan mengenai algoritma yang mereka gunakan serta pengembangan mekanisme efektif dalam memverifikasi keakuratan informasi yang beredar (Bakir & McStay, 2017).

Kedua, peningkatan literasi media di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda yang rentan terhadap pengaruh disinformasi, menjadi langkah krusial. Program edukasi yang menanamkan kemampuan berpikir kritis serta keterampilan mengecek fakta harus diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dan lembaga pendidikan guna membekali individu menghadapi arus informasi yang begitu deras (Mofferz, 2020).

Ketiga, mengingat disinformasi bersifat lintas negara, kerjasama internasional menjadi sangat penting dalam menangani masalah ini. Negara-negara perlu membangun sinergi dan kebijakan bersama yang efektif untuk menghadapi dampak negatif disinformasi terhadap hubungan diplomatik serta stabilitas politik dan sosial global.

Disinformasi yang menyebar luas di era post-truth telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap sistem demokrasi serta dinamika mobilitas global. Dalam ranah demokrasi, disinformasi menimbulkan kerusakan serius terhadap kepercayaan publik terhadap institusi politik yang seharusnya menjadi pilar utama dalam tata kelola pemerintahan. Penyebaran informasi palsu yang dipengaruhi oleh agenda emosional dan ideologis memperdalam polarisasi sosial, menghambat terbentuknya dialog yang konstruktif, dan melemahkan partisipasi politik yang sehat dan berbasis fakta. Akibatnya, warga negara sering kali membuat keputusan politik yang tidak didasari oleh realitas objektif.

Selain itu, disinformasi juga berdampak luas pada mobilitas global. Narasi-narasi menyesatkan yang mengandung ketakutan dan prasangka terkait isu-isu internasional seperti imigrasi dan keamanan turut memperburuk ketegangan antarnegara dan menimbulkan hambatan bagi kerja sama lintas batas. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana disinformasi tidak hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga menjadi tantangan yang mengancam stabilitas dan keharmonisan hubungan global (Salma Nabila Rianissa 2024).

1.2.2 Jenis-jenis disinformasi

A. Misinformasi

Misinformasi merupakan jenis informasi yang keliru atau tidak akurat, namun penyebarannya biasanya dilakukan tanpa niat jahat. Orang yang menyebarkan misinformasi sering kali mempercayai bahwa informasi tersebut benar, sehingga penyebarannya terjadi secara tidak sengaja. Contoh dari misinformasi dapat berupa berita lama yang dipublikasikan kembali seolah-olah masih relevan atau faktual, padahal konteks dan kebenarannya sudah berubah. Selain itu, mitos-mitos populer seperti yang berkaitan dengan kesehatan, astrologi, dan sains sering kali tersebar luas di masyarakat meskipun tidak didukung oleh bukti ilmiah yang sah. Penyebarannya kerap kali dilandasi niat baik, namun tetap berpotensi menyesatkan publik.

Ali Fauzi (2020) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar yang tidak disengaja dan tidak bertujuan untuk merugikan pihak lain. Sementara itu, disinformasi adalah penyebaran informasi palsu yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk menipu, menyesatkan, atau menciptakan persepsi yang salah. Disinformasi dapat mencakup manipulasi konten, pemalsuan sumber, atau pembuatan informasi tiruan. Berbeda dengan keduanya, malinformasi adalah informasi yang sebenarnya benar, namun disebarluaskan dengan niat jahat, seperti untuk merusak reputasi seseorang, menyebarkan ujaran kebencian, atau membocorkan informasi pribadi. Oleh karena itu, malinformasi termasuk dalam kategori informasi yang mengancam, meskipun tidak selalu palsu.

Ketiga bentuk informasi ini — misinformasi, disinformasi, dan malinformasi — menjadi tantangan serius dalam era digital, khususnya di media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan masif. Untuk menghadapinya, literasi digital menjadi kunci penting agar masyarakat mampu mengenali, menyaring, dan mengkritisi berbagai jenis konten yang mereka konsumsi maupun sebar.

Di era digital yang serba cepat saat ini, penyebaran misinformasi di media sosial telah menjadi persoalan yang krusial. Misinformasi tidak hanya menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat, tetapi juga berdampak pada menurunnya kredibilitas sumber informasi, termasuk media arus utama. Dalam konteks ini, penting bagi setiap individu untuk membangun kompetensi literasi digital yang memadai agar mampu mengenali dan menangkal informasi yang menyesatkan.

Konten yang menyesatkan di media sosial sering kali dikemas dalam bentuk narasi yang emosional, judul yang provokatif, serta penggunaan visual seperti gambar atau video yang dimanipulasi, sehingga menarik perhatian dan lebih mudah menyebar. Strategi semacam ini dirancang secara psikologis untuk mempengaruhi emosi dan keyakinan audiens, membuat mereka cenderung membagikan informasi tanpa verifikasi terlebih dahulu.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, keterampilan literasi digital seperti kemampuan berpikir kritis, literasi media, serta kewargaan digital sangat penting untuk dikembangkan. Individu harus mampu mengevaluasi validitas suatu informasi, memahami konteks di balik sebuah konten, dan menyadari tanggung jawab etis dalam membagikan informasi secara daring. Selain itu, pemanfaatan alat bantu seperti situs pengecekan fakta, panduan evaluasi sumber, serta platform edukasi literasi media menjadi upaya strategis

dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh terhadap misinformasi. Dengan demikian, literasi digital bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi merupakan bagian integral dari kemampuan bertahan dalam lanskap informasi yang semakin kompleks dan dinamis.

Kemampuan individu dalam mengaplikasikan keterampilan serta memanfaatkan berbagai alat literasi digital merupakan langkah strategis dalam menghadapi dan menanggulangi penyebaran misinformasi di media sosial. Dengan memperkuat fondasi literasi digital, seseorang tidak hanya mampu memilah dan menilai validitas informasi yang ditemui secara daring, tetapi juga dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan berdasar fakta. Proses ini melibatkan analisis kritis terhadap isi informasi, pengenalan terhadap sumber yang kredibel, serta pemahaman atas konteks sosial dan budaya di mana informasi tersebut beredar.

Ketika masyarakat secara kolektif memiliki kemampuan literasi digital yang memadai, maka akan terbentuk ekosistem digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Individu yang teredukasi dalam literasi digital cenderung lebih berhati-hati dalam membagikan informasi, tidak mudah terprovokasi oleh konten provokatif, dan lebih aktif dalam menyaring serta memverifikasi data. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya memberikan dampak positif pada tingkat personal, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat digital yang kritis, aktif, dan berdaya dalam menghadapi kompleksitas arus informasi di era digital saat ini (Irham Akbar and Rezza Fahlevvi 2023)

B. *Disinformasi*

Era digital telah merevolusi cara manusia dalam memperoleh, memproduksi, dan menyebarkan informasi. Kemunculan media sosial, situs berita daring, dan berbagai platform komunikasi digital lainnya tidak hanya memperluas ruang ekspresi publik, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, etika, dan sosial yang kompleks. Salah satu tantangan paling menonjol adalah meningkatnya penyebaran berita palsu atau disinformasi, yaitu informasi keliru yang disebarkan secara sengaja untuk menyesatkan. Fenomena ini secara serius mengancam integritas ekosistem informasi dan turut membentuk opini publik secara tidak objektif.

Sering Disinformasi kerap kali diperkuat oleh strategi rekayasa sosial digital, termasuk penggunaan algoritma media sosial yang menciptakan *filter bubble* di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang sesuai dengan preferensinya. Hal ini mempersempit ruang dialog kritis dan memperbesar potensi polarisasi. Selain itu, kampanye informasi yang dirancang dengan manipulatif mampu memengaruhi persepsi kolektif secara sistematis, yang pada akhirnya meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi sosial, media, dan bahkan pemerintah. Ketika masyarakat tidak lagi yakin terhadap kebenaran informasi yang mereka terima, dampaknya bukan hanya pada penurunan kualitas demokrasi, tetapi juga pada meningkatnya ketegangan sosial dan instabilitas politik (Bahram, 2023).

Nasionalita dan Nugroho (dalam Jurnal Demokrasi) mengidentifikasi dua persoalan fundamental yang mencuat dalam lanskap informasi digital masa kini. Pertama, derasnya arus informasi yang membanjiri internet

menjadikan pengguna terpapar oleh berbagai jenis informasi—baik yang bersifat faktual maupun fiktif. Kecepatan dan volume informasi yang menyebar tanpa kendali menimbulkan tantangan tersendiri. Jika individu tidak memiliki kecakapan dalam memilah dan merespons informasi secara kritis, kondisi ini bukan sekadar menyebabkan *information overload*, tetapi juga berpotensi menyeret individu ke dalam situasi *cyberswamp*—yakni kubangan informasi yang tidak jelas, penuh distorsi, dan membingungkan.

Kedua, kemudahan dalam menciptakan dan mendistribusikan konten di era digital memberikan ruang luas bagi eksplorasi kreatif, namun pada saat yang sama membuka celah bagi penyalahgunaan. Fleksibilitas dalam produksi konten ini memungkinkan munculnya praktik manipulatif, di mana informasi sengaja diciptakan sebagai komoditas dengan tujuan tertentu. Dalam konteks ini, disinformasi menjadi salah satu konsekuensi utama—yakni penyebaran informasi yang salah secara sengaja untuk menyesatkan publik, mempengaruhi opini, atau mencapai kepentingan tertentu. Keberadaan disinformasi tidak hanya mengganggu ekosistem komunikasi publik, tetapi juga merongrong fondasi kepercayaan sosial secara lebih luas.

Penyebaran hoaks atau informasi palsu di era digital telah menjadi ancaman serius yang berdampak luas, baik terhadap individu maupun terhadap tatanan sosial secara umum. Informasi yang tidak benar, ketika diterima tanpa verifikasi, berpotensi menimbulkan kepanikan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap media dan institusi, serta memicu tindakan yang tidak rasional dan merugikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi secara kritis menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, literasi digital hadir sebagai keterampilan esensial yang harus dimiliki setiap individu agar mampu mengelola dan mengevaluasi informasi secara bertanggung jawab.

Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup aspek kognitif dan etis dalam memahami, memilah, dan menyikapi arus informasi, terutama yang beredar melalui media sosial. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah. Banyak pengguna media sosial yang belum mampu membedakan antara informasi yang sah dengan berita bohong, sehingga mudah terpengaruh oleh hoaks yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Tidak hanya itu, rendahnya kesadaran terhadap etika dalam penggunaan media sosial juga berdampak pada kualitas hidup pengguna. Ketergantungan yang berlebihan pada media sosial tanpa adanya kontrol dan kesadaran digital dapat mengakibatkan pemborosan waktu serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental, seperti stres, kecemasan, dan isolasi sosial. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital bukan hanya menjadi solusi dalam menangkal hoaks, tetapi juga menjadi kunci dalam membentuk masyarakat yang lebih cerdas, bijak, dan tahan terhadap manipulasi informasi (Februari et al., 2024).

Memasuki era Revolusi Industri 4.0, teknologi digital telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Ketersediaan perangkat teknologi yang semakin terjangkau dan koneksi internet yang luas telah

mendorong peningkatan literasi digital masyarakat. Bahkan, dalam praktiknya, ketergantungan terhadap teknologi digital semakin tinggi, menjadikannya sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan itu, arus informasi pun menjadi lebih deras dan mudah diakses melalui berbagai platform digital, terutama media daring.

Namun, kemudahan akses terhadap informasi tersebut tidak serta merta diimbangi dengan jaminan keamanan dan kualitas informasi yang diterima. Masyarakat kini dihadapkan pada tantangan serius berupa maraknya peredaran informasi yang menyesatkan, seperti disinformasi, misinformasi, dan hoaks, yang banyak ditemukan dalam pemberitaan online maupun di media sosial.

Hoaks sendiri merujuk pada informasi palsu atau berita bohong yang disusun sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan dan seolah-olah merupakan fakta yang valid. Dengan kata lain, hoaks merupakan bentuk rekayasa informasi yang bertujuan untuk memutarbalikkan fakta demi mencapai tujuan tertentu, baik untuk kepentingan politik, ekonomi, maupun sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sudah mulai akrab dengan teknologi digital, masih terdapat kesenjangan dalam kemampuan kritis untuk memilah informasi yang benar dan valid dari informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, penguatan literasi digital yang komprehensif menjadi sangat penting untuk membekali masyarakat agar mampu menghadapi tantangan informasi di era digital ini secara bijak dan bertanggung jawab.

Disinformasi merupakan bentuk penyimpangan informasi yang bersifat disengaja. Berbeda dengan misinformasi yang disebarkan karena ketidaktahuan, disinformasi disampaikan oleh pihak yang sadar sepenuhnya bahwa informasi tersebut tidak benar, namun tetap memilih untuk menyebarkannya dengan maksud tertentu. Dalam konteks ini, disinformasi adalah kebohongan terstruktur yang dirancang oleh aktor jahat untuk menyesatkan opini publik dan menciptakan kebingungan sosial. Penyebaran disinformasi kerap kali merupakan bagian dari strategi kampanye yang lebih besar, yang bisa saja disponsori oleh institusi negara, kelompok politik, atau kekuatan ideologis tertentu dengan target dan motif yang spesifik (Nurjanah et al., 2023).

Pola penyebaran disinformasi dapat bervariasi, tergantung pada tujuan dan sasaran kampanye. Beberapa di antaranya bertujuan untuk mendistorsi realitas, membingkai ulang narasi, atau menggiring opini publik menuju suatu kepentingan tertentu. Dalam praktiknya, disinformasi dapat hadir dalam berbagai bentuk konten manipulatif, baik secara visual, verbal, maupun melalui data.

Secara umum, terdapat sejumlah kategori disinformasi dan misinformasi yang dapat dibedakan berdasarkan karakteristiknya, antara lain: satire atau parodi (yang sering disalahpahami sebagai fakta), koneksi yang salah (menghubungkan informasi yang tidak relevan), konten menyesatkan, konten salah, konten tiruan, konten yang dimanipulasi, dan konten palsu. Di sisi lain, hoaks juga memiliki klasifikasi tersendiri berdasarkan teknik penyampaian, seperti manipulasi foto, manipulasi video, manipulasi berita, manipulasi klaim dari ahli, hingga manipulasi berbasis data.

Beragamnya bentuk dan cara penyebaran informasi yang menyesatkan

ini memperkuat urgensi penguatan literasi digital di tengah masyarakat. Pemahaman terhadap ragam disinformasi dan misinformasi menjadi langkah awal dalam membangun daya tahan publik terhadap distorsi informasi di era digital.

Media sosial telah menjadi elemen sentral dalam kehidupan masyarakat global, termasuk di Indonesia. Di antara berbagai platform yang tersedia, beberapa di antaranya telah mengalami pertumbuhan pengguna yang sangat signifikan dan menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat. Salah satu yang paling populer adalah Twitter, sebuah layanan mikroblog yang memungkinkan pengguna mengirimkan pesan singkat hingga 280 karakter. Kemudahan penggunaan dan kecepatan dalam menyebarkan informasi menjadikan Twitter sebagai alat komunikasi yang efektif dalam menyampaikan opini maupun informasi secara luas dan instan. (Nisa 2024a)

Sementara itu, Facebook menempati posisi sebagai platform media sosial dengan pengguna terbanyak di dunia. Per Januari 2021, tercatat lebih dari 2,7 miliar pengguna aktif menggunakan layanan ini, menjadikannya sebagai media sosial paling dominan secara global. Facebook tidak hanya digunakan untuk berbagi status dan foto, tetapi juga menjadi media strategis dalam berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, dan politik.

Selain Facebook, platform lain seperti YouTube dan WhatsApp juga menunjukkan angka pengguna yang tinggi, masing-masing mencapai 2,3 miliar dan 2 miliar pengguna di seluruh dunia. Instagram dan Facebook Messenger mengikuti di belakang dengan jumlah pengguna masing-masing sekitar 1,2 miliar dan 1,3 miliar.

Tidak hanya platform dari Barat, media sosial asal Tiongkok juga menunjukkan dominasi di pasar global. Aplikasi seperti WeChat (1,2 miliar pengguna), TikTok (689 juta pengguna), QQ (617 juta), Douyin (600 juta), dan Sina Weibo (511 juta) memperlihatkan bahwa penggunaan media sosial kini telah menjadi fenomena lintas negara dan budaya.

Tingginya penetrasi media sosial ini memiliki implikasi besar terhadap pola komunikasi, penyebaran informasi, dan bahkan dinamika sosial-politik. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap penggunaan media sosial dan dampaknya menjadi bagian penting dalam literasi digital masyarakat modern (Sarjito 2021)

C. *Malinformasi*

Malinformasi merupakan sebuah jenis informasi yang mengandung unsur kebenaran, baik berupa fakta parsial maupun keseluruhan yang bersifat objektif. Namun, penyampaian informasi tersebut sengaja dikemas sedemikian rupa dengan tujuan untuk merugikan atau mencelakai pihak tertentu. Informasi yang disebarkan dalam bentuk malinformasi biasanya melibatkan pengungkapan data pribadi atau hal-hal yang seharusnya bersifat privat, sehingga berdampak negatif bagi individu yang menjadi sasaran.

Berbeda dengan malinformasi, misinformasi terjadi ketika seseorang membagikan informasi yang keliru tanpa mengetahui bahwa informasi tersebut salah. Dalam situasi ini, penyebar misinformasi percaya bahwa apa yang mereka sampaikan adalah benar, meskipun kenyataannya tidak. Misalnya,

seseorang yang tanpa sengaja menyebarkan berita palsu karena kurangnya verifikasi.

Sementara itu, disinformasi mengacu pada informasi yang sengaja diproduksi dan disebarkan oleh seseorang yang sudah menyadari ketidakbenaran berita tersebut. Disinformasi biasanya dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kepentingan politik, ekonomi, atau sosial. Praktik ini mencerminkan niat jahat dalam menyebarluaskan kebohongan demi memanipulasi opini publik atau merugikan kelompok tertentu.

Dalam konteks ini, istilah-istilah malinformasi, misinformasi, dan disinformasi yang diperkenalkan oleh Derakhshan dan Wardle (2017) sudah mulai dikenal oleh masyarakat, termasuk para narasumber dalam penelitian ini. Namun, pemahaman masyarakat umum terhadap istilah-istilah tersebut masih tergolong rendah, terutama karena istilah tersebut terasa terlalu teknis dan sulit dipahami bagi sebagian besar orang. Hal ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu mengenali dan membedakan berbagai bentuk informasi yang beredar, sehingga dapat mengambil sikap kritis terhadap setiap berita yang diterima.

Lowongan pekerjaan palsu yang beredar di media digital memiliki beberapa ciri khas yang dapat menjadi tanda peringatan bagi para pencari kerja. Pertama, penggunaan bahasa dalam penulisan lowongan cenderung tidak formal dan kurang profesional. Kedua, kualifikasi yang diminta biasanya sangat umum dan luas, sehingga mampu menarik minat banyak pelamar tanpa seleksi yang ketat. Ketiga, penawaran gaji yang terkesan tinggi sering kali tidak disertai dengan rincian nominal yang jelas, sehingga menimbulkan keraguan. Keempat, informasi mengenai alamat perusahaan yang membuka lowongan sering kali tidak lengkap atau tidak dicantumkan sama sekali. Kelima, kontak email yang digunakan biasanya merupakan alamat palsu atau menggunakan domain gratis yang kurang kredibel. Keenam, pelamar sering diminta melakukan pembayaran dengan alasan yang tidak transparan atau kurang jelas, yang tentunya menjadi indikasi penipuan (Jobstreet, 2019).

Selain itu, fenomena penyebaran berita hoaks atau informasi palsu di media digital terjadi dengan sangat cepat. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan pengguna media digital untuk berinteraksi dengan kelompok yang memiliki minat dan pandangan serupa. Selain itu, kecepatan distribusi serta kemudahan berbagi konten pada platform digital, terutama aplikasi pesan instan seperti Telegram, turut berperan besar dalam mempercepat penyebaran informasi, baik yang benar maupun yang menyesatkan.

Telegram merupakan aplikasi pesan instan berbasis cloud yang menonjolkan kecepatan dan aspek keamanan dalam pengiriman pesan. Dengan fitur sinkronisasi multi-perangkat, pengguna dapat mengakses akun Telegram dari berbagai perangkat secara bersamaan dengan mudah. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk bertukar pesan teks, audio, video, gambar, hingga stiker dengan tingkat keamanan yang tinggi, di mana seluruh konten yang dikirimkan sudah dienkripsi menggunakan standar internasional (Fahana & Ridho, 2018). Di Indonesia, Telegram kerap dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan sebagai alat komunikasi internal maupun sebagai media penyebaran informasi secara efisien.

Perlu dicatat bahwa istilah “Telegram” awalnya merujuk pada layanan pengiriman pesan tertulis jarak jauh yang difasilitasi oleh kantor pos. Namun, seiring perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat, layanan tersebut kini telah digantikan oleh teknologi modern seperti aplikasi pesan instan yang lebih praktis dan multifungsi, termasuk Telegram versi digital saat ini.

Fenomena penyebaran informasi melalui media digital, khususnya aplikasi Telegram, semakin marak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks lowongan pekerjaan. Namun, pemanfaatan media digital ini tidak selalu berjalan sesuai fungsi positifnya. Peneliti merasa terdorong untuk mengkaji lebih dalam mengenai penyalahgunaan media digital Telegram dalam penyebaran informasi lowongan pekerjaan yang tidak valid atau palsu. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Penyalahgunaan Media Digital Telegram dalam Penyebaran Lowongan Pekerjaan.”

Informasi yang salah atau tidak akurat yang beredar di media digital sering kali menimbulkan berita hoaks yang dapat merugikan masyarakat. Dalam konteks penyebaran lowongan pekerjaan melalui Telegram, peneliti mengidentifikasi tiga faktor utama yang berperan dalam proses penyebaran informasi keliru tersebut, yaitu disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Meskipun istilah-istilah tersebut telah dikenal di kalangan tertentu, para narasumber mengungkapkan bahwa istilah tersebut masih dianggap terlalu teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi digital di masyarakat masih perlu ditingkatkan agar mampu mengenali dan membedakan berbagai jenis informasi yang beredar.

Lebih lanjut, pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyebaran informasi di platform Telegram belum sepenuhnya memadai dan cenderung kurang kritis dalam menyikapi berita yang diterima. Meski demikian, terdapat sebagian masyarakat yang sudah menyadari pentingnya literasi digital sebagai alat untuk menyaring informasi secara tepat dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang menyesatkan. Oleh karena itu, penguatan literasi digital menjadi suatu kebutuhan penting dalam menghadapi arus informasi yang sangat cepat dan beragam di media digital (Friawan Pratamaputra et al. 2024)

1.2.3 Mekanisme penyebaran disinformasi diplatform digital

Dalam era digital yang ditandai dengan ledakan informasi, big data muncul sebagai teknologi penting dalam pengelolaan dan analisis data dalam skala besar. Big data mengacu pada himpunan data yang sangat besar, beragam, dan kompleks, sehingga memerlukan pendekatan teknis tertentu dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisisnya. Seperti yang dijelaskan oleh Mayer-Schönberger dan Cukier (2020), big data memungkinkan penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih akurat melalui pengenalan pola dan tren tersembunyi dari data yang tersedia.

Dalam konteks deteksi hoaks dan disinformasi, big data memainkan peran penting karena mampu mengolah berbagai jenis informasi dari media digital, seperti teks, gambar, serta interaksi antar pengguna di platform berita dan media sosial. Untuk mendukung analisis ini, teknologi seperti machine learning (ML) dan Natural Language Processing (NLP) telah digunakan secara luas. Algoritma ML seperti Support Vector Machine (SVM) dan Random Forest terbukti mampu mengkategorikan konten berdasarkan fitur linguistik tertentu yang

menjadi ciri khas hoaks atau informasi valid (Shu et al., 2021).

Sementara itu, teknologi NLP memfasilitasi proses ekstraksi fitur-fitur penting dari teks, seperti analisis sentimen, identifikasi kata kunci, serta pengenalan struktur bahasa yang umum ditemukan dalam narasi hoaks. Beberapa studi terdahulu menunjukkan efektivitas integrasi big data dan machine learning dalam deteksi hoaks. Sebagai contoh, Castillo et al. (2021) mengembangkan model klasifikasi untuk mendeteksi berita palsu di Twitter dengan memanfaatkan pola penyebaran serta atribut pengguna. Sementara itu, Jin et al. (2020) menerapkan pendekatan deep learning untuk mengidentifikasi hoaks dalam berita online berdasarkan konten dan metadata yang dikandungnya.

Walaupun pendekatan berbasis big data menawarkan presisi yang tinggi dalam identifikasi konten bermasalah, tantangan tetap ada. Besarnya volume data yang harus diproses memerlukan daya komputasi tinggi, serta sistem yang mampu bekerja secara real-time. Selain itu, karena strategi penyebaran hoaks terus berubah, maka model deteksi perlu selalu diperbarui untuk mengantisipasi teknik manipulasi informasi yang baru (Shu et al., 2020).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, kolaborasi antara akademisi, penyedia platform digital, serta pembuat kebijakan publik menjadi penting. Pendekatan yang kolaboratif dapat melahirkan sistem deteksi yang tidak hanya efisien dan adaptif, tetapi juga terintegrasi dalam ekosistem digital yang lebih luas. Dengan demikian, pemanfaatan big data tidak hanya membantu menanggulangi hoaks, tetapi juga meningkatkan kualitas literasi digital dan ketahanan informasi masyarakat secara umum.

Dalam lanskap digital global saat ini, fenomena hoaks dan disinformasi telah menjadi tantangan serius yang memengaruhi berbagai sektor kehidupan, seperti politik, kesehatan masyarakat, hingga keamanan sosial. Wardle dan Derakhshan (2021) membedakan antara dua istilah penting ini: *hoaks* sebagai informasi palsu yang sengaja dirancang untuk menipu, dan *disinformasi* sebagai penyebaran informasi yang keliru dengan motif tertentu, misalnya untuk membentuk opini publik atau memperkeruh situasi sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Vosoughi et al. (2018) menemukan bahwa berita palsu memiliki tingkat penyebaran yang jauh lebih cepat dan luas dibandingkan dengan informasi yang sah, khususnya di platform digital seperti media sosial dan situs berita daring. Penyebab utama dari tingginya laju penyebaran ini adalah karena hoaks seringkali dikemas dalam bentuk narasi sensasional yang memancing emosi pembaca.

Lebih lanjut, Lewandowsky et al. (2020) menyatakan bahwa dampak dari hoaks tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merusak tatanan sosial secara kolektif. Misalnya, penyebaran informasi palsu dapat menimbulkan kepanikan publik, memecah belah masyarakat, bahkan mengganggu proses demokratisasi. Dalam sektor kesehatan, disinformasi terbukti memperparah krisis, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19. Informasi keliru tentang vaksin dan protokol kesehatan menyebabkan keraguan publik, yang pada akhirnya menghambat upaya mitigasi pandemi (Pennycook et al., 2020).

Platform berita online dan media sosial, yang seharusnya berfungsi sebagai kanal informasi terpercaya, sering justru menjadi jalur utama penyebaran hoaks dan disinformasi. Hal ini tidak terlepas dari desain algoritma yang memprioritaskan konten viral, bukan kebenaran. Artikel-artikel hoaks biasanya menggunakan judul yang bombastis, penuh dengan kata-kata emosional seperti "*mengejutkan*," "*terungkap*," atau "*bocoran rahasia*" guna menarik klik sebanyak mungkin.

Karakteristik lain dari penyebaran hoaks di media sosial adalah adanya tingkat interaksi yang tinggi—baik berupa suka, komentar, maupun pembagian ulang—yang memperkuat

visibilitas konten tersebut di linimasa pengguna lain. Mekanisme semacam ini menyebabkan berita palsu memiliki efek resonansi yang besar, sehingga mempersulit upaya klarifikasi atau koreksi dari sumber informasi yang kredibel.

Dalam konteks ini, deteksi dini dan penanganan sistematis terhadap hoaks menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan sosial dan integritas demokrasi. Diperlukan upaya kolektif, termasuk dari regulator, akademisi, pengembang platform, hingga masyarakat sipil, dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Dalam konteks media digital kontemporer, tingginya interaksi sosial terhadap konten tertentu—seperti jumlah komentar, pembagian, dan tanda suka—sering kali tidak mencerminkan validitas informasi yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, berbagai studi menunjukkan bahwa konten yang mendapatkan perhatian besar dari pengguna justru cenderung mengandung informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Hal ini diperparah oleh mekanisme sistem rekomendasi berbasis algoritma yang bekerja secara otomatis memperkuat bias pengguna, sehingga menciptakan ruang gema (*echo chamber*) yang mempercepat sirkulasi hoaks dan disinformasi.

Fenomena ini menjadi semakin relevan mengingat platform berita daring kini menjadi titik krusial dalam distribusi informasi kepada publik. Seperti ditunjukkan dalam temuan Salsabila, Dewi, dan Hayat (2024), hoaks memiliki pola penyebaran yang jauh lebih cepat dibandingkan berita faktual, terutama di media sosial yang mengandalkan algoritma untuk menyebarkan konten. Konten hoaks umumnya didesain dengan gaya yang memancing respons emosional pembaca melalui penggunaan judul hiperbolik seperti "mengejutkan", "terungkap", atau "bocoran rahasia". Judul-judul seperti ini menciptakan keterlibatan tinggi yang kemudian secara otomatis diperluas jangkauannya oleh sistem algoritmik.

Sistem rekomendasi algoritma yang digunakan oleh platform berita dan media sosial juga menjadi faktor penting dalam memperparah kondisi ini. Tandoc et al. (2021) mencatat bahwa algoritma cenderung menyajikan informasi yang selaras dengan preferensi pengguna, sekalipun informasi tersebut tidak akurat, sehingga memperkuat kepercayaan terhadap konten palsu dan memperlemah kemampuan kritis individu terhadap informasi yang mereka konsumsi.

Di sisi lain, peran media sosial sebagai saluran utama penyebaran hoaks tidak dapat diabaikan. Penelitian oleh Rahayu (2021) menunjukkan bahwa tingginya interaksi pengguna dalam bentuk komentar, berbagi ulang, dan menyukai konten secara langsung berkontribusi terhadap viralitas informasi hoaks. Sementara itu, data yang dikumpulkan oleh Anisa, Mukhlash, dan Iqbal (2023) menegaskan bahwa konten yang bersifat sensasional dan emosional lebih berpeluang mendapatkan perhatian publik, sehingga memperbesar kemungkinan penyebarannya secara masif.

Yang semakin mengkhawatirkan, hoaks kini juga telah mengalami evolusi strategi untuk menghindari pendeteksian otomatis. Dalam penelitian terbaru, Pawlicka et al. (2024) menemukan bahwa para penyebar hoaks mulai menggunakan metafora, ambiguitas, dan konstruksi bahasa yang lebih halus guna mengecoh sistem deteksi berbasis machine learning. Perubahan ini menuntut sistem deteksi hoaks untuk terus diperbarui dan disempurnakan, agar mampu beradaptasi dengan dinamika penyebaran informasi palsu yang kian kompleks.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya melawan hoaks dan disinformasi tidak cukup hanya dengan pendekatan teknologi, tetapi juga memerlukan kebijakan publik yang komprehensif dan literasi digital yang kuat di kalangan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, platform teknologi, lembaga riset, dan masyarakat sipil menjadi semakin penting untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan mendukung keberlanjutan demokrasi (Laia,

Lukman Hakim, and Suryadi 2025)

1.2.4 Dampak Disinformasi pada Individu dan Masyarakat

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan informasi secara instan. Namun, di sisi lain, era digital juga menghadirkan tantangan baru, salah satunya adalah penyebaran informasi yang tidak benar atau dikenal dengan istilah *hoaks*. Fenomena ini menjadi semakin mencolok dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana utama dalam memperoleh dan mendistribusikan berita.

Hoaks secara umum dapat dimaknai sebagai informasi yang diciptakan secara sengaja untuk menyesatkan atau memperdaya publik, sering kali dengan motif tersembunyi seperti kepentingan politik, manipulasi ekonomi, atau sekadar menciptakan sensasi. Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hoaks merupakan informasi bohong yang disusun dan disebarluaskan untuk menipu khalayak. Lebih lanjut, Ketua Komunitas Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Septiaji Eko Nugroho, menyatakan bahwa hoaks adalah hasil rekayasa informasi yang bertujuan menutup-nutupi kebenaran, bahkan sering digunakan sebagai alat untuk membalikkan fakta yang sebenarnya.

Profesor Muhammad Alwi Dahlan, pakar komunikasi dari Universitas Indonesia sekaligus mantan Menteri Penerangan, menekankan bahwa terdapat perbedaan esensial antara hoaks dan berita bohong biasa. Menurutnya, hoaks merupakan bentuk kebohongan yang sistematis, disengaja, dan terencana, sehingga efek yang ditimbulkan cenderung lebih merusak, baik terhadap individu maupun tatanan sosial secara keseluruhan.

Penyebaran hoaks di media sosial telah menjadi isu serius yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks demokrasi. Informasi palsu yang menyebar dengan cepat tanpa melalui proses verifikasi kerap menimbulkan kegelisahan, kesalahpahaman, bahkan konflik sosial yang mengganggu kohesi masyarakat. Selain itu, hoaks juga dapat memengaruhi cara pandang publik terhadap isu-isu penting, serta menggiring opini dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat pribadi maupun dalam lingkup kebijakan publik.

Kondisi ini secara tidak langsung menggerus kualitas demokrasi. Demokrasi yang sehat seharusnya ditopang oleh arus informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika masyarakat dibanjiri oleh informasi yang menyesatkan, kemampuan mereka untuk membuat keputusan rasional pun terganggu. Hal ini tentu dapat mengancam integritas proses demokrasi, terutama dalam konteks pemilu, kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dan komprehensif dari seluruh elemen masyarakat untuk menangani persoalan ini. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang berkaitan dengan diseminasi informasi digital, khususnya dalam menindak pelaku penyebaran hoaks. Lembaga media dituntut untuk meningkatkan standar etika jurnalistik dan memperkuat proses verifikasi berita sebelum dipublikasikan. Sementara itu, platform media sosial harus mengembangkan sistem algoritma yang lebih canggih untuk mendeteksi serta menghambat penyebaran konten hoaks secara efektif.

Yang tidak kalah penting, masyarakat sebagai konsumen informasi harus diberdayakan agar memiliki literasi digital yang memadai. Kecakapan dalam menilai validitas sebuah informasi serta kesadaran untuk tidak menyebarkan konten yang belum terverifikasi adalah langkah awal untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat. Dalam konteks

demokrasi, hal ini sangat penting agar partisipasi publik dapat berlangsung dalam kerangka informasi yang benar dan bertanggung jawab (Yopita Desriana Butar 2024).

1.3 Hubungan Infomasi dan Penanggulangan Disinformasi

1.3.1 Bagaimana Kecakapan Literasi Digital dan Penanggulangan Disinformasi

Beberapa jurnal menyoroti pentingnya kecakapan literasi digital dalam membantu individu mengenali dan menangkal disinformasi. Literasi digital mencakup kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, serta menggunakan informasi secara etis di berbagai platform digital. Dalam konteks ini, kecakapan tersebut berperan besar dalam membedakan antara informasi yang sah dan yang menyesatkan, seperti mengenali ciri-ciri konten hoaks, mengevaluasi keandalan sumber, serta melihat konsistensi isi informasi (Annisa Anastasia Salsabila, Dinie Anggraeni Dewi, and Rizky Saeful Hayat 2023).

Penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat literasi media digital yang baik secara signifikan meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi informasi palsu, misalnya dalam isu-isu penting seperti vaksin Covid-19. Selain itu, literasi digital mendorong kebiasaan berpikir kritis dan penggunaan alat bantu verifikasi, seperti situs pengecekan fakta, yang membuat masyarakat lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Bahkan, pendekatan ini dipandang sebagai strategi utama untuk memperkuat ketahanan informasi nasional dalam menghadapi arus disinformasi yang meluas di media sosial.

Maka dari itu, keterampilan literasi digital menjadi fondasi penting dalam membentuk masyarakat yang tangguh terhadap hoaks dan disinformasi di era digital ini.

1.3.2 Peran Berfikir Kritis dalam Mengevaluasi Informasi Digital.

Berpikir kritis merupakan kemampuan penting dalam literasi digital yang berfungsi untuk mengevaluasi dan menilai keakuratan informasi yang diterima di dunia maya. Menurut Mursyida, Mahendra, dan Saputra (2023), literasi digital bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu agar dapat bersikap kritis dan cerdas dalam memanfaatkan informasi digital, sehingga mampu menangkal hoaks dan disinformasi yang marak beredar (Aveny, Trio Mahendra, and Saputra 2023).

Selain itu, literasi digital juga membantu pengguna media sosial untuk mengidentifikasi sumber informasi yang dapat dipercaya dan memahami konteks di balik informasi tersebut, sehingga mengurangi risiko penyebaran berita palsu (Nisa 2024). Oleh karena itu, pengembangan kemampuan berpikir kritis menjadi kunci utama dalam membangun kecakapan literasi digital di perguruan tinggi, yang berimplikasi pada peningkatan kualitas informasi yang dikonsumsi dan disebarkan oleh civitas akademika.

1.4 Implikasi pada Perguruan Tinggi

1.4.1 Tantangan Disinformasi bagi mahasiswa

Di era digital saat ini, mahasiswa dihadapkan pada tantangan serius dalam membedakan informasi yang akurat dan yang menyesatkan. Kurangnya literasi digital dan kemampuan berpikir kritis membuat mereka rentan menerima bahkan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi (“Literasi Digital Jadi Kunci Tangkal Hoax Di Kalangan Mahasiswa Ubhara Jaya – Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,” n.d.). Banyak mahasiswa mengalami kesulitan

dalam mengenali hoaks di media sosial, terutama karena rendahnya kepercayaan diri dalam memeriksa kebenaran informasi (self-efficacy) (Nurrahmi and Syam 2020). Selain itu, bias kognitif seperti bias konfirmasi menyebabkan mahasiswa lebih mudah mempercayai informasi yang sesuai dengan pandangan pribadi atau kelompoknya tanpa mempertimbangkan kebenaran objektifnya (“Literasi Digital Jadi Kunci Tangkal Hoax Di Kalangan Mahasiswa Ubhara Jaya – Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,” n.d.)

1.4.2 Dampak Disinformasi terhadap Proses Pembelajaran dan Lingkungan Akademik

Disinformasi memberikan dampak negatif pada kegiatan belajar dan suasana akademik di perguruan tinggi. Penyebaran informasi palsu dapat memengaruhi cara mahasiswa memandang isu-isu penting dalam ranah politik, sosial, maupun akademik (Wulandari et al., n.d.). Akibatnya, muncul polarisasi pandangan, penguatan stereotip, dan terganggunya proses pengambilan keputusan yang sehat. Selain itu, kualitas diskusi ilmiah menjadi menurun, kerja sama antar mahasiswa terganggu, dan tercipta lingkungan belajar yang tidak sehat. Mahasiswa yang sering terpapar hoaks cenderung menjadi pasif dalam mencari informasi, hanya mengandalkan satu sumber, atau menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya apabila dianggap menarik atau sejalan dengan preferensinya (Nurrahmi and Syam 2020).

1.4.3 Peran Strategis Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Literasi Digital

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran dan kemampuan literasi digital di kalangan mahasiswa. Pelatihan psikoedukatif, program pembelajaran terstruktur, serta diskusi yang bersifat partisipatif terbukti mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan memverifikasi informasi mahasiswa (“Literasi Digital Jadi Kunci Tangkal Hoax Di Kalangan Mahasiswa Ubhara Jaya – Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,” n.d.). Literasi digital juga dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum melalui mata kuliah seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), agar mahasiswa terbiasa menganalisis dan mengevaluasi informasi secara objektif (Amir et al. 2025). Penggunaan teknologi pendidikan seperti Learning Management System (LMS), simulasi pemeriksaan fakta, serta kegiatan kolaboratif dapat mendorong partisipasi aktif mahasiswa dan memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi disinformasi (Amir et al. 2025).

Selain itu, perguruan tinggi perlu menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah dan penyedia media sosial untuk menyusun kebijakan, menyediakan fitur pelaporan, serta mengembangkan teknologi pendeteksi hoaks yang lebih efektif. Melalui edukasi yang konsisten dan pendekatan yang menyeluruh, mahasiswa diharapkan mampu menjadi pengguna informasi yang cerdas, pembuat konten yang bertanggung jawab, serta agen perubahan dalam masyarakat digital (“Literasi Digital Jadi Kunci Tangkal Hoax Di Kalangan Mahasiswa Ubhara Jaya – Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,” n.d.; Amir et al. 2025).

KESIMPULAN

Di tengah kemajuan teknologi dan maraknya penyebaran informasi keliru, kecakapan literasi digital menjadi keterampilan penting yang wajib dimiliki, khususnya oleh kalangan mahasiswa. Literasi digital bukan hanya tentang keterampilan menggunakan perangkat teknologi, melainkan juga mencakup kemampuan berpikir kritis dalam mengakses, menilai, mengolah, dan menyebarluaskan informasi secara etis dan bertanggung jawab. Kelima aspek utama literasi digital—yakni penguasaan informasi, komunikasi digital, produksi konten, keamanan di dunia

maya, serta pemecahan masalah berbasis teknologi—perlu dikuasai secara menyeluruh.

Jenis-jenis informasi salah seperti misinformasi, disinformasi, dan malinformasi memberikan dampak negatif yang besar terhadap kualitas demokrasi, kestabilan sosial, dan proses pendidikan tinggi. Media sosial sebagai sarana utama penyebaran konten digital kerap mempercepat laju penyebaran informasi palsu yang sering kali menyesatkan.

Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memperkuat kemampuan literasi digital mahasiswa melalui kurikulum, pelatihan, serta kerja sama lintas sektor. Harapannya, mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang aktif, tetapi juga mampu menjadi pelopor dalam menciptakan ruang digital yang sehat, kritis, dan bebas dari disinformasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Preya, L. O., Safitri, N. M., Maharani, A., & Putri, A. G. E (2024). Kemampuan literasi digital dalam proses perkuliahan mahasiswa PGSD Universitas Jambi. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(1), 10048 – 10054.
- Amir, Rafi'ul, Adinda Rizal Putri, Sindi Nur Zaini, and Taslim Batubara. 2025. "Pendidikan Pancasila Dan Ketahanan Informasi Di Era Post-Truth." *Polyscopia* 2 (1): 34–41. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v2i1.1559>.
- Annisa Anastasia Salsabila, Dinie Anggraeni Dewi, and Rizky Saeful Hayat. 2023. "Pentingnya Literasi Di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks Di Media Sosial." *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa* 3 (1): 45–54. <https://doi.org/10.58192/insdun.v3i1.1775>.
- Aswan, Dedy. n.d. "Analisis Pengaruh Literasi Digital Terhadap Kemandirian Belajar Mahasiswa Dalam Era Internet." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Oktober 2023 (20): 949–55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10362490>.
- Aveny, Aveny Kurnia Mursyida, Yozan Trio Mahendra, and Dandy Saputra. 2023. "Literasi Digital Sebagai Upaya Menangkal Hoax Di Lingkungan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Tonggak Pendidikan Dasar : Jurnal Kajian Teori Dan Hasil Pendidikan Dasar* 2 (1): 36–48. <https://doi.org/10.22437/jtpd.v2i1.22866>.
- Budaya, Model, Literasi Digital, Pada Pondok, Pesantren Angga, Teguh Prastyo, and Angga Teguh Prastyo. 2022. "Model Budaya Literasi Digital Pada Pondok Pesantren Berbasis Perguruan Tinggi Di Masa Covid-19." Vol. XIII. www.tribunnews.com/nasional/2021/03/22/tingkat-.
- "Daftar Isi." n.d. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-literasi-digital/>.
- Digital, Pengertian Literasi. n.d. "Lihat Juga : 7 Dampak Positif Globalisasi, Salah Satunya Perkembangan IPTEK." <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230830110039-561-992266/pengertian-literasi-digital-prinsip-manfaat-dan-contoh-penerapannya>.
- Friawan Pratamaputra, Geovany, Riesta Ayu Oktarina, Fakultas Ilmu Komunikasi, and Program Studi Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya Nginden Intan Timur. 2024. "LITERASI DIGITAL DALAM PENERIMAAN BERITA HOAKS TENTANG LOWONGAN PEKERJAAN MELALUI TELEGRAM." *Jurnal Komunikasi Dan Media*. Vol. 4.
- Irham Akbar, Mohammad, and Mohammad Rezza Fahlevvi. 2023. "Cegah Penyebaran Misinformasi Di Media Sosial Menggunakan Peralatan Dan Fitur Literasi Digital." *RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua* 1 (1): 15–20.
-

- <https://doi.org/10.61124/1.renata.2>.
- Jordana, Theresia Amelia, and Dyna Herlina Suwanto. 2017. "Pemetaan Gerakan Literasi Digital Di Lingkup Universitas Negeri Yogyakarta." *INFORMASI* 47 (2): 167.
<https://doi.org/10.21831/informasi.v47i2.15735>.
- Laia, Mitranikasih, Muhammad Lukman Hakim, and Dikky Suryadi. 2025. "Analisis Big Data Untuk Deteksi Hoaks Dan Disinformasi Di Platform Berita Online."
 "Literasi Digital Jadi Kunci Tangkal Hoax Di Kalangan Mahasiswa Ubhara Jaya – Universitas Bhayangkara Jakarta Raya." n.d.
- "Literasi Digital_ Pengertian, Pilar, Dan Manfaatnya." n.d.
- Naufal, Haickal Attallah. 2021. "LITERASI DIGITAL." *Perspektif* 1 (2): 195–202.
<https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i2.32>.
- Nisa, Khoirun. 2024a. "Peran Literasi Di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks Dan Disinformasi Di Media Sosial." *Impressive: Journal of Education* 2 (1): 1–11.
<https://doi.org/10.61502/ijoe.v2i1.75>.
- . 2024b. "Peran Literasi Di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks Dan Disinformasi Di Media Sosial." *Impressive: Journal of Education* 2 (1): 1–11.
<https://doi.org/10.61502/ijoe.v2i1.75>.
- Nur, Ratih, and Indah Sari. n.d. "MENUMBUHKAN KARAKTER MAHASISWA MELALUI LITERASI DIGITAL DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0."
- Nurjanah, Ervina, Agus Rusmana, and Andri Yanto. 2017. "HUBUNGAN LITERASI DIGITAL DENGAN KUALITAS PENGGUNAAN E-RESOURCES." *Lentera Pustaka* 3 (2): 117–40.
- Nurrahmi, Febri, and Hamdani M. Syam. 2020. "Perilaku Informasi Mahasiswa Dan Hoaks Di Media Sosial." *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4 (2): 129–46.
<https://doi.org/10.15575/cjik.v4i2.9215>.
- Salma Nabila Rianissa. 2024. "Disinformasi Di Era Post-Truth: Ancaman Terhadap Demokrasi Dan Mobilitas Global." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2 (1): 37–46.
<https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.659>.
- Sarjito, Aris. 2021. "Hoaks, Disinformasi, Dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi Dalam Masyarakat Digital Indonesia." *Journal of Governance and Local Politics*. Vol. 5.
- Setyaningsih, Rila, Edy Prihantoro, Universitas Darussalam Gontor, Universitas Gunadarma, and Jl Raya Siman. n.d. "MODEL PENGUATAN LITERASI DIGITAL MELALUI PEMANFAATAN E-LEARNING."
- Wulandari, Putri, Program Studi, Ilmu Politik, and Fisip Untan. n.d. "IMPACT OF HOAX NEWS IN SOCIAL MEDIA IN AFFECTING STUDENT OPINION AT THE SELECTION OF PRESIDENTS AND VICE PRESIDENTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 2019." <https://jurnafis.untan.ac.id;http://jurnal.fisipuntan.org>.
- Yopita Desriana Butar. 2024. "Analisis Penyebaran Hoax Di Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat." *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 3 (2): 252–58.
<https://doi.org/10.55606/jpbb.v3i2.3201>.
-